

**STRATEGI NAZ INDIA DALAM MENDORONG
PENCABUTAN UU ANTI SODOMI DI INDIA**



OLEH :

YULIA DWI ANDRIYANTI

151080005

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA MAHASISWA : YULIA DWI ANDRIYANTI\
NIM : 151080005
JUDUL SKRIPSI : STRATEGI *NAZ INDIA* DALAM MENDORONG
PENCABUTAN UU ANTI SODOMI DI INDIA

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan tim penguji Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Pada Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juli 2012
Jam : 12.30
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Nikolaus Loy, MA

Sri Issundari, S.IP, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : YULIA DWI ANDRIYANTI\
NIM : 151080005
JUDUL SKRIPSI : STRATEGI *NAZ INDIA* DALAM MENDORONG
PENCABUTAN UU ANTI SODOMI DI INDIA

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan di
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Pada Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juli 2012
Jam : 12.30
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nikolaus Loy, MA
Ketua

Sri Issundari, S.IP, M.Hum
Anggota

Ludiro Madu, S.IP, M.Si
Anggota

Aryanta Nugraha, S.IP, M.Si
Anggota

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa tulisan ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecurangan/penjiplakan/plagiat, maka saya siap menerima sanksi akademik, sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Yogyakarta, 6 September 2012

Yulia Dwi Andriyanti

“A queer(in) life is *self*-ing the other and *other*-ing the self”

(Yulia Dwi Andriyanti)

www.semangkuk-subaltern.blogspot.com

*Teruntuk kita semua yang berusaha terus mendobrak
struktur relasi kuasa yang melekat terlalu kuat di
pikiran dan tubuh kita sendiri*

KATA PENGANTAR

Perjuangan identitas menjadi bagian dari teori gerakan sosial baru. Ini merupakan perspektif baru dalam gerakan sosial dimana permasalahan dan kesenjangan tidak lagi dilihat dalam konteks perebutan ruang sosial dan ekonomi semata. Tulisan ini menjadi salah satu upaya untuk menggambarkan hal tersebut dengan mengangkat persoalan yang terjadi di India melalui Pasal 377, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Anti Sodomi. Pasal ini menjadi sarana bagi negara, melalui aparat kepolisian, untuk mengkriminalkan identitas seksualitas sesama jenis di India, yang kemudian disebut dengan istilah LGBTIQ (Lesbian Gay Biseksual Transgender/Transeksual Interseks dan Queer). Pasal yang bertahan selama hampir 150 tahun di India ini akhirnya dapat dicabut melalui upaya yang dilakukan *Naz India*, sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu kesehatan seksual dan HIV/AIDS. Oleh karena itu *Strategi Naz India dalam Mendorong Pencabutan UU Anti Sodomi di India* menjadi judul yang diharapkan dapat menunjukkan bagaimana dekriminalisasi terhadap orang-orang LGBTIQ terjadi melalui proses pembingkaihan isu kesehatan seksual MSM (Men Sex Men) dan efek mobilisasi isu tersebut terhadap gerakan LGBTIQ di India.

Saya berangkat dari pemahaman gerakan sosial sebagai sebuah aksi kolektif yang tidak sekedar sporadis, melainkan bersifat institusional sehingga aktor gerakan sosial juga merupakan aktor organisasional. Hal ini menjadi gerbang untuk memahami konteks keberhasilan dalam pencabutan UU Anti Sodomi tidak terlepas dari keberlangsungan *Naz India* sebagai organisasi gerakan

sosial - yang pada awalnya hanya bertindak sebagai pemberi layanan – yang tumbuh dan berkembang di India paska liberalisasi pada 1990an. Melalui wacana AIDS yang mengglobal, pembingkaihan isu yang dilakukan oleh *Naz India* tidak hanya menjadi hal yang bersifat strategis dalam memobilisasi dukungan di tataran domestik dan internasional, namun juga diskursif; menjadi proses perdebatan dikalangan organisasi gerakan sosial lainnya yang juga turut mendukung pencabutan pasal tersebut.

Saya sangat berterimakasih kepada orang-orang yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan tulisan ini, terutama kepada ayah beserta kakak perempuan saya, Masdi Abdullah dan Andhika Pratiwi, karena telah memberikan kepercayaan bahwa saya bisa menyelesaikan studi S1 ini; kepada Pak Nikolaus Loy, MA sebagai dosen pembimbing I dan juga teman terbaik selama di kampus untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman; kepada Ibu Sri Issundari, S.IP, M.Hum sebagai dosen pembimbing II; kepada Eta dan Edite sebagai rekan satu angkatan yang saling menyemangati selama proses bimbingan hingga pendadaran; kepada *housemate* saya Nisaul Aulia yang memberikan ruang dan kondisi yang sangat kondusif bagi saya untuk menulis, kepada Anam, Pines, Intan, dan Andrian di YIFoS (Youth Interfaith Forum on Sexuality), Bu Nursyahbani Katjasungkana, Kak Agustin dan Kak Lily, Angelika Levi dan tim *Children of Srikandi*, Johanna Poethig, Kerry dan Victoria, Anna Marsiana, Gabriela Jaeger, Katherine Hermans yang membuat saya percaya bahwa saya bisa menjadi salah satu bagian dari gerakan perubahan.

Kepada partner perempuan saya, Vica Krisilia Larasati, terimakasih karena telah menjadi tempat dimana saya bisa selalu pulang. Terakhir, untuk *silence*, yang selalu menjadi media refleksi dan dialog terhadap diri.

Saya berharap berbagai saran dan dukungan akan terus mengalir dari pembaca melalui perbincangan di level akademis maupun praktis, baik mengenai diskursus seksualitas sesama jenis maupun gerakan sosial, sehingga mendorong terus penelitian maupun kerja-kerja perubahan di area gender dan seksualitas untuk kedepannya.

Yogyakarta, September 2012

Yulia Dwi Andriyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvi
ABSTRAK	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Perumusan Masalah	8
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Argumen Pokok	18
F. Metode Penelitian	18
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
H. Batasan Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	19

BAB II DISKURSUS SEKSUALITAS DALAM INDIA KUNO- PERTENGAHAN, *BRITISH INDIA* DAN INDIA POSKOLONIAL

A. Wacana Seksualitas dalam India Kuno dan Pertengahan	21
A.1. Wacana Seksualitas dalam Literatur Suci Weda	22
A.2. Wacana Seksualitas dalam Karya Sastra Hindu Kuno	27
A.3. <i>Hijra</i> : Manifestasi dari Kehidupan <i>Tritiya-Prakriti</i> di India	29

A.4. Masa-Masa India Pertengahan : Tradisi Persia-Arab	31
B. Pemberlakuan Pasal 377 tahun 1860 di India	35
B.1. Wacana “Homoseksual” dalam Pengkodifikasian Hukum Kriminal Inggris : “ <i>Sodomite</i> ”, “ <i>Buggery</i> ”, “ <i>Not to be Named</i> ” hingga <i>Unnatural Offences</i> ”	35
B.2. Homogenisasi Kolonial Inggris terhadap Hukum India	38
B.3. Penerapan Pasal 377 di British India : Kriminalisasi Sistematis terhadap Seksualitas Sesama Jenis	41
B.3.1. Mitos Forensik <i>Infunibuliform</i>	42
B.3.2. Dari “ <i>Vagrant</i> ” hingga “ <i>Eunuch</i> ”	43
B.3.3. Absennya <i>Consent</i> dan Ornamentasi Baru “ <i>Carnal Intercourse against Nature</i> ”	45
C. India Paska Kemerdekaan : Anti-Kolonialisme dan Homofobia	46
C.1. Intervensi Negara terhadap Kehidupan Seksual : Kondom bagi Kontrol Populasi dan HIV/AIDS	50
C.2. Kondom dan AIDS : Kontestasi Pasal 377 di Ruang Publik India	52

BAB III UPAYA NAZ INDIA MEMANFAATKAN *POLITICAL OPPORTUNITY STRUCTURE (POS)* DALAM MEMOBILISASI GERAKAN LGBTIQ DI INDIA

A. Membangun Kerangka Berpikir mengenai Gerakan Sosial	56
B. Teori <i>Political Opportunity Structure (POS)</i>	62
C. Wacana <i>Queer</i> Global	66
D. Periode Awal Gerakan LGBTIQ di India	69
E. Naz India dalam Gerakan LGBTIQ di India	71
F. Pemanfaatan <i>Political Opportunity Structure (POS)</i>	76
F.1. Terbukanya Akses Politik	77
F.2. Pergeseran Posisi Dukungan dan Aliansi dalam Institusi Politik	88
F.3. Ketersediaan Dukungan yang Berpengaruh.....	91
F. Menuju pada Dekriminalisasi : Parade Individu-Individu LGBTIQ India ...	94

BAB IV STRATEGI *FRAMING* DAN PENGGUNAAN *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK* (TAN) NAZ INDIA DALAM PENCABUTAN

PASAL 377

A. Kerangka Aksi Kolektif sebagai Proses Pembingkaihan Isu (<i>Framing</i>)	100
A.1. Tugas Pembingkaihan Isu yang Utama	101
A.2. Inovasi dan Perkembangan dalam Pembingkaihan Isu.....	107
B. Hak-hak Seksual dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Kerangka Aksi Kolektif Naz India	109
B.1. Strategi <i>Framing</i> Naz India	114
B.2. Efek Pembingkaihan Isu Naz India terhadap Kesadaran Publik.....	122
C. Jaringan Advokasi Transnasional	127
D. Penggunaan Jaringan Advokasi Transnasional oleh Naz India	133

BAB V KESIMPULAN 145

DAFTAR PUSTAKA 152

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan antara Studi Organisasional dan Gerakan Sosial	11
Tabel 1.2	Fokus dan Ruang Lingkup Studi Organisasional dan Gerakan Sosial	12
Gambar 3.1	Paradigma <i>Political Opportunity Structure</i>	63
Gambar 3.2	Dimensi <i>Political Opportunity Structure (POS)</i>	65
Gambar 4.1	Hirarki Seks	113
Gambar 4.2	Pola Efek Bumerang <i>Transnational Advocacy Network (TAN)</i>	129

DAFTAR SINGKATAN

ABVA	AIDS Bhedbhav Virodhi Andolan (AIDS Anti-Discrimination Movement)
AI	Amnesty International
AIIMS	All India Institute of Medical Sciences
BJP	Bharatiya Janata Party
CBO	Community Based Organization
CALERI	Campaign for Lesbian Right
GALVA	Gay and Lesbian Vaishnava Association
HIV/AIDS	Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
HRW	Human Right Watch
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICPD	International Conference on Population and Development
IGLHRC	International Gay Lesbian Human Right Commission
ILGA	International Lesbian and Gay Association
IMF	International Monetary Fund
LGBTIQ	Lesbian Gay Biseksual Transgender/Transeksual Interseks dan Queer
MSM	Men Sex Men
NACO	National AIDS Control Organization
NACP	National Aids and Control Programme
NDA	National Democratic Alliance
NFI	Naz Foundation International
NGO	Non Government Organization

NRI	Non-Resident Indian
PIL	Public Interest Litigation
POS	Political Opportunity Structure
RSS	Rashtriya Swayamsevak Sangh
SACD	State AIDS Control Societies
SAP	Structural Adjustment Program
TAN	Transnational Advocacy Network
UNAIDS	United Nation on Acquired Immune Deficiency Syndrome
UNGASS	United Nations General Assembly Special Session
UPA	United Progressive Alliance
WHO	World Health Organization

DAFTAR ISTILAH

Orientasi Seksual	Ketertarikan seseorang secara seksual, emosional dan spiritual, baik heteroseksual, homoseksual, maupun biseksual
Identitas gender	Kecenderungan seseorang untuk mengidentifikasi dirinya pada gender tertentu, baik perempuan, laki-laki, transgender <i>female-to-male (FtM)</i> ; perempuan yang merasa dirinya laki-laki serta transgender <i>male-to-female (MtF)</i> ; laki-laki yang merasa dirinya perempuan
<i>Hijra</i>	Istilah yang digunakan oleh laki-laki yang menjelaskan bahwa dirinya bukan perempuan dan laki-laki, namun sebagai gender ketiga. Hijra cenderung adalah <i>crossdresser</i> dan merupakan bagian dari komunitas budaya, sosial dan religius
<i>Kothi</i>	Label bagi laki-laki yang perilakunya feminin (baik untuk menarik perhatian partner seksual yang lebih “laki-laki” maupun sebagai bagian dari konstruksi gendernya) yang memiliki kecenderungan untuk dipenetrasi secara anal dan/atau oral
<i>Crossdresser</i>	Seseorang yang berpenampilan berkebalikan dari seks biologis maupun peran gendernya
<i>Gay-identified man</i>	Laki-laki yang diidentifikasi karena kecenderungan perilaku seksual sesama jenis, baik anal seks maupun oral seks
Ekspresi Gender	Manifestasi seseorang terhadap gendernya, baik bersifat feminin maupun maskulin yang ditunjukkan melalui sikap, penampilan, dan perilakunya
<i>Queer</i>	Istilah payung yang digunakan dalam menggambarkan variasi seksualitas yang tidak termasuk atau yang tidak mau disebutkan dalam istilah lesbian, gay, biseksual, transgender, transeksual, dan interseks. Pada perkembangannya, istilah ini tidak hanya mengacu pada seksualitas saja, namun juga pada sesuatu yang diluar dari norma kebanyakan

ABSTRAK

India merupakan salah satu negara yang berada dibawah koloni Inggris sejak tahun 1860 dimana Inggris memberlakukan Pasal 377 *Unnatural Offences* untuk mengkriminalkan praktik homoseksualitas dan sodomi. Pasal yang juga merupakan bagian dari *Macaulay code* ini juga berfungsi untuk meletakkan aturan yang beradab bagi *British India* karena Macaulay menganggap bahwa India sebagai *oriental vices*. Namun, pasal ini masih bertahan bahkan ketika India merdeka.

Keberadaan pasal 377 tidak dapat terlepas dari bagaimana diskursus seksualitas non-normatif berkembang sehingga konteks historis dan sosiologis India dari waktu ke waktu menjadi signifikan untuk memahami bagaimana pasal ini kemudian menjadi alat untuk mengkriminalkan praktik seks sejenis dan juga LGBTIQ (Lesbian Gay Biseksual Transgender/Transeksual Interseks dan Queer).

Berkembangnya HIV/AIDS di India pada 1990an mendorong perdebatan mengenai pasal ini sehingga muncul dipermukaan yang berkonsekuensi pada munculnya aksi kolektif untuk mencabut pasal tersebut. Berbagai organisasi gerakan sosial pun tumbuh dan berkembang sejalan dengan wabah HIV/AIDS yang menjadi ancaman bagi India. *Insiden Lucknow 4* menjadi gerbang awal bagi *Naz India* sebagai organisasi non-pemerintah untuk melakukan advokasi legal melalui pemanfaatan struktur kesempatan politik India paska liberalisasi ekonomi.

Petisi legal *Naz India* untuk mencabut pasal 377 Undang-Undang Anti Sodomi berefek pada mobilisasi dukungan yang masif, baik dari dalam negeri maupun internasional. Strategi pembingkaihan isu yang dibangun menunjukkan bagaimana isu kesehatan seksual MSM (Men Sex Men) menjadi elemen yang signifikan dalam mengartikulasikan bahwa pasal 377 bertentangan dengan moral konstitusi. Disamping itu intervensi legal yang juga dilakukan oleh *Voice Against 377* menjadi representasi masyarakat sipil yang menepis argumentasi yang disampaikan pemerintah bahwa pasal 377 penting dipertahankan untuk menjaga moralitas publik. Di level internasional, jaringan advokasi transnasional yang terbangun dengan IGLHRC (International Gay and Lesbian Human Right Commission) dan HRW (Human Right Watch) berkontribusi terhadap pembentukan agenda mengenai isu LGBT dan hak asasi manusia; prasyarat yang harus dimiliki oleh India sebagai negara yang demokratis dan modern.

Kata kunci : Pasal 377, pembingkaihan isu, jaringan advokasi transnasional, struktur kesempatan politik, organisasi gerakan sosial